



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

KECAMATAN MOJOAGUNG

Juli 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufiq, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mojoagung (Renja Kecamatan Mojoagung) Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Kecamatan Mojoagung (Renja Kecamatan Mojoagung) merupakan acuan perencanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2025, Renstra Kecamatan Mojoagung Tahun 2024-2026, serta RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 guna pencapaian target dan sasaran pembangunan daerah.

Mekanisme dan tahapan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Mojoagung sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan berdasarkan Kepmendagri No. 050-05889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyusunan Renja Kecamatan Mojoagung diawali dengan proses evaluasi dan dilakukan penyesuaian dengan perkembangan terkini kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi serta terbitnya ketentuan yang harus ditindaklanjuti daerah.

Harapan kami semoga Renja Kecamatan Mojoagung ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Mojoagung, 10 Juli 2024

CAMAT MOJOAGUNG



MUCHTAR, S.IP., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19720621 199803 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... I - 1

1.1. Latar Belakang..... I - 1

1.2. Landasan Hukum I - 2

1.3. Maksud dan Tujuan I - 4

1.3.1. Maksud I - 4

1.3.2. Tujuan..... I - 4

1.4. Sistematika Penulisan I – 4

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU. II - 1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Kecamatan Mojoagung.....II - 1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mojoagung.....II - 2

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....II - 3

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....II - 4

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....II - 5

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....III - 1

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Mojoagung.....III - 2

3.3 Program Dan Kegiatan.....III - 3

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MOJOAGUNG.....IV

BAB V PENUTUPV



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Matrik Penyesuaian Renja Kecamatan Mojoagung Tahun 2024
dengan APBD Tahun Anggaran 202..... I – 6

Tabel 2.1. Evaluasi Pelaksanaan APBD Sampai Dengan Triwulan II Tahun
2023..... II – 4

Tabel 3.1. Perubahan program dan Kegiatan Kecamatan Mojoagung
Tahun 2024..... III - 2

RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN MOJOAGUNG TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – Perangkat Daerah), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Mojoagung mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial menguraikan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- Renja merupakan dokumen dasar penyusunan program kegiatan OPD/Perangkat Daerah kedalam KUA dan PPAS serta penyusunan dan perencanaan program kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
- Renja Perangkat Daerah juga merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah, pada tahun 2025 ini merupakan tahun kedua

pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Perangkat Daerah (PD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang menyusun Dokumen Renja 2025 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

1.1.1. Pengertian Renja

Rencana Kerja merupakan Rencana Kerja selama satu tahun sebagai pedoman dalam menentukan langkah – langkah yang akan datang tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai wujud pernyataan kehendak masyarakat dalam kurun waktu satu tahun kedepan. Rencana Kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra). Rencana Kerja Kecamatan Mojoagung menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan beserta target yang ingin dicapai berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah satu acuan bagi Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

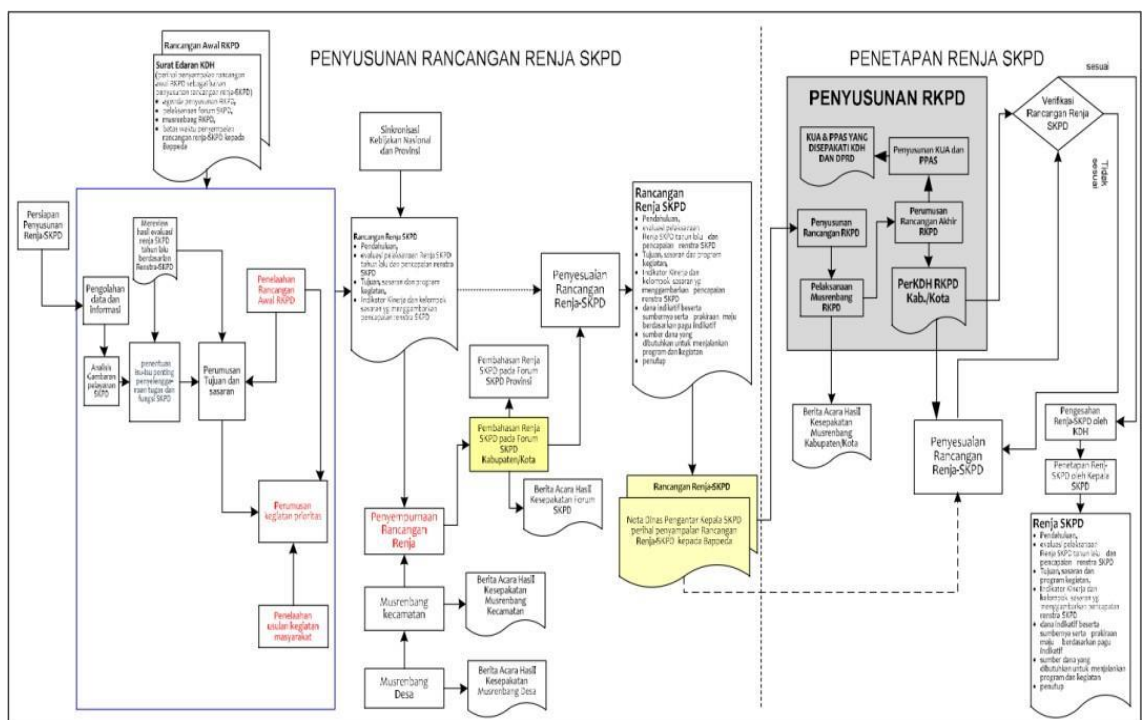
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan renja ini sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan basis data KUA PPAS tahun 2025 yang memuat arah kebijakan Pemerintah dalam satu tahun. Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah :

Gambar 1.1

Alur Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota



1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu tiga tahun. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan, yang mana tugas-tugas tersebut meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
8. Menyelenggarakan kegiatan perencanaan program pembangunan, perekonomian, produksi pertanian, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup dan sosial budaya di lingkungan Kecamatan ;
9. Mengkoordinasikan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) di wilayah kerjanya;
10. Melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait di wilayah kerjanya;
11. Melaksanakan tugas pembantuan;
12. Menyusun program, ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan.

Mengingat semakin komplek tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra kepada Bupati.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas maka di Kecamatan Mojoagung telah disusun suatu Rencana Strategis yang dikenal dengan (RENSTRA) yang merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh sebab itu prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 23/2014 yang meliputi demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta

keragaman dan potensi daerah merupakan titik tolak dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mojoagung Tahun 2024 – 2026 yang diorientasikan untuk mewujudkan tujuan Kabupaten Jombang di Kecamatan Mojoagung.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis yang telah disusun akan diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) Tahunan yang merupakan dasar dari penilaian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di Kecamatan Mojoagung untuk rentang waktu tahun 2024 sampai dengan 2026.

Penyusunan Renja OPD Kecamatan Mojoagung Tahun 2025 mengacu pada penyusunan RKPD Tahun 2025 yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 dengan tema/arrah pembangunan daerah tahun 2024 yang harus dapat diwujudkan adalah “Hilirisasi Agrobisnis” serta sesuai tugas pokok dan fungsi OPD sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mojoagung tahun 2025 antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-05889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 59/D, Tambahan Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 59/D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun

2021-2041 (lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 10/E)

17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 10/A);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 114 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 114/A);
19. Surat Bupati Jombang Nomor 050/8051/415.42/2022 tanggal 12 Oktober 2022 perihal Penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026
20. Peraturan Bupati Jombang No 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 10/E)
21. Surat Edaran Bupati Jombang Nomor : 050/844/415.01/2023 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025 dan Rencana Kerja PD Tahun 2025.
22. Peraturan Bupati Jombang No 45 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 45).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Mojoagung tahun 2025 adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Mojoagung guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh

Pemerintah Kabupaten Jombang maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Mojoagung tahun 2025 adalah :

- a. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
- b. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Jombang khususnya Kecamatan Mojoagung;
- c. Membuat acuan perencanaan yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
- d. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Mojoagung
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mojoagung
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program Dan Kegiatan

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2023) dan Tahun n-1 (2024) berdasarkan target indikator kinerja program tidak memenuhi target P–Renstra. Terdapat 6 Program, 12 Kegiatan dan 25 Sub kegiatan yang memenuhi target sesuai Perencanaan Renstra dan Renja. Adapun program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Program dan Kegiatan Kecamatan Mojoagung Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung

			Kantor atau Bangunan Lainnya
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan secara umum mengalami peningkatan baik penyerapan anggaran kegiatan. Rata-rata capaian kinerja kegiatan pada tahun 2023 mencapai 100% dengan penyerapan anggaran sebesar 94,17%.

Berikut disajikan secara terperinci pencapaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2023 serta hambatan dan permasalahan yang terjadi sekaligus kebijakan/rekomendasi yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut, yakni:

A. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan, adalah: Semua program/kegiatan/Sub Kegiatan tidak ada yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

B. Realisasi Program/Kegiatan/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan, adalah:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kinerja tercapai 100%, dan penyerapan anggaran 100%
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%.
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 98,66%
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 92,83%

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD tercapai 100% dengan penyerapan anggaran 100%
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 94,13%
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 88,10%
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang –Undangan kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 99,72%
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 99,87%

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 99,72%
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 99,92%
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 98%
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%
 - Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 97,53%
 - Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%
8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada diwilayah Kecamatan kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%
9. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%

10. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%

- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%
- Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%

11. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH UMUM kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%
- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%
- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%

12. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%

- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%

- C. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil Keluaran Yang Direncanakan, adalah:

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK dengan indikator kinerja Nilai Paten Kecamatan dengan target 82 tercapai 112,89% dengan penyerapan anggaran sebesar 100%.

- D. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan.

Faktor-Faktor Penyebab Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan:

1. Dukungan dan komitmen Camat Mojoagung, Kepala UPTD/B Se-Kecamatan, Kepala Desa serta stakeholder lain dalam mendukung pencapaian target pelaksanaan program pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Mojoagung untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Dengan posisi kecamatan yang strategis, sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) maka dapat diterapkan demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui dukungan Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat melalui Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014
3. Kompetensi SDM aparatur Kecamatan Mojoagung yang kompeten di bidangnya
4. Seluruh stakeholder Kecamatan memahami tupoksi dan target kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen PK, sehingga kinerja dapat tercapai maksimal.
5. Adanya monitoring kinerja setiap tribulan dari atasan dapat mengidentifikasi kendala dan masalah dalam pencapaian target kinerja.

E. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Mojoagung. Dari program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Mojoagung sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah:

- ✓ Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Mojoagung tahun 2024-2026 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Mojoagung pada umumnya,
- ✓ Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target/ melebihi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Mojoagung berdampak pada laporan kinerja dan realisasi keuangan Kecamatan Mojoagung.

F. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, adalah:

1. Meningkatkan kualitas proses perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan secara matang dan terpadu.
2. Melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan APBD Tahun 2024.
3. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang tupoksi serta memberikan pendampingan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.
4. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi kepada OPD terkait kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan.

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Mojoagung dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.2

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
KECAMATAN MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG**

RENSTRA PERUBAHAN 2018 - 2023 (Kepmendagri 0550-05889)																											
No	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target program dan kegiatan (Renja perangkat daerah tahun n-1) 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan								
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023							Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2024 TB II			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2		3	4			5			6			7				8=7/6			9			10=(5+7+9)			11=(10/4)	
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		%	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100,00	persen	2.946.355.224	N/A	N/A	N/A	100,00	persen	3.188.430.224	100	persen	2.994.043.720	100%	93,90%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100,00	persen	7.918.200	N/A	N/A	N/A	100,00	persen	7.918.200	100	persen	7.918.200	100%	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		

	7.01.01.2 .01.01	SUB KEGIATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	doku men	5.868.2 00	N/ A	N/ A	N/ A	3	doku men	5.868.2 00	3	doku men	5.868.2 00	100 %	100,0 0%	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A
	7.01.01.2 .01.06	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	lapor an	2.050.0 00	N/ A	N/ A	N/ A	5	lapor an	2.050.0 00	5	lapor an	2.050.0 00	100 %	100,0 0%	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A
	7.01.01.2 .02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase Pencairan Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu	100 ,00	perse n	2.609.9 78.274	N/ A	N/ A	N/ A	100 ,00	perse n	2.609.9 78.274	100	perse n	2.428.1 15.652	100 %	93,03 %	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A
			2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100 ,00	perse n		N/ A	N/ A	N/ A	100 ,00	perse n		100	perse n		100 %		N/ A	N/ A		N/ A	N/ A		N/ A	N/ A
	7.01.01.2 .02.01	SUB KEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	oran g	2.535.3 55.274	N/ A	N/ A	N/ A	20	oran g	2.535.3 55.274	20	oran g	2.353.4 92.652	100 %	92,83 %	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A
	7.01.01.2 .02.03	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verif ikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verif ikasi Keuangan SKPD	12	doku men	71.598. 000	N/ A	N/ A	N/ A	12	doku men	71.598. 000	12	doku men	71.598. 000	100 %	100,0 0%	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A

	7.01.01.2 .02.05	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	lapor an	3.025.0 00	N/ A	N/ A	N/ A	1	lapor an	3.025.0 00	1	lapor an	3.025.0 00	100 %	100,0 0%	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A
	7.01.01.2 .05	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Mojoagung	0	perse n	-	N/ A	N/ A	N/ A	0	perse n	-	0	perse n	-	0%	0,00 %	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A
	7.01.01.2 .05.02	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapanny a	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	paket	-	N/ A	N/ A	N/ A	0	paket	-	0	paket	-	0%	0,00 %	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A
	7.01.01.2 .06	KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 ,00	perse n	115.283 .600	N/ A	N/ A	N/ A	100 ,00	perse n	103.341 .600	100	perse n	97.274. 400	100 %	94,13 %	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A
	7.01.01.2 .06.01	SUB KEGIATAN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	paket	967.300	N/ A	N/ A	N/ A	6	paket	967.300	6	paket	967.300	100 %	100,0 0%	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A
	7.01.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22	paket	15.769. 500	N/ A	N/ A	N/ A	32	paket	15.769. 500	32	paket	15.752. 300	100 %	99,89 %	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A

	7.01.01.2 .06.04	SUB KEGIATAN Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	23	paket	57.750. 000	N/ A	N/ A	N/ A	23	paket	50.820. 000	23	paket	44.770. 000	100 %	88,10 %	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A
	7.01.01.2 .06.05	SUB KEGIATAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	6.652.8 00	N/ A	N/ A	N/ A	2	paket	6.652.8 00	2	paket	6.652.8 00	100 %	100,0 0%	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A
	7.01.01.2 .06.06	SUB KEGIATAN Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	1	doku men	2.352.0 00	N/ A	N/ A	N/ A	1	doku men	2.352.0 00	1	doku men	2.352.0 00	100 %	100,0 0%	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A
	7.01.01.2 .06.09	SUB KEGIATAN Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	lapor an	31.792. 000	N/ A	N/ A	N/ A	4	lapor an	26.780. 000	4	lapor an	26.780. 000	100 %	100,0 0%	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A
	7.01.01.2 .07	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100 ,00	perse n	54.115. 026	N/ A	N/ A	N/ A	100 ,00	perse n	96.335. 985	100	perse n	95.422. 500	100 %	99,05 %	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A
	7.01.01.2 .07.10	SUB KEGIATAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25	unit	54.115. 026	N/ A	N/ A	N/ A	25	unit	96.335. 985	25	unit	95.422. 500	100 %	99,05 %	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A

7.01.01.2 .08	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100 ,00	perse n	99.227. 124	N/ A	N/ A	N/ A	100 ,00	perse n	100.123 .165	100	perse n	99.990. 626	100 %	99,87 %	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A
7.01.01.2 .08.02	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	lapor an	25.427. 124	N/ A	N/ A	N/ A	24	lapor an	25.723. 165	24	lapor an	25.652. 178	100 %	99,72 %	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A
7.01.01.2 .08.04	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25	lapor an	73.800. 000	N/ A	N/ A	N/ A	24	lapor an	74.400. 000	24	lapor an	74.338. 448	100 %	99,92 %	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A
7.01.01.2 .09	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 ,00	perse n	59.833. 000	N/ A	N/ A	N/ A	100 ,00	perse n	270.733 .000	100	perse n	265.322 .342	100 %	98,00 %	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A
7.01.01.2 .09.02	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	unit	36.348. 000	N/ A	N/ A	N/ A	13	unit	37.248. 000	13	unit	37.247. 342	100 %	100,0 0%	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A

	7.01.01.2 .09.09	SUB KEGIATAN Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	5	unit	9.335.0 00	N/ A	N/ A	N/ A	5	unit	219.335 .000	5	unit	213.925 .000	100 %	97,53 %	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A
	7.01.01.2 .09.10	SUB KEGIATAN Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	unit	14.150. 000	N/ A	N/ A	N/ A	12	unit	14.150. 000	12	unit	14.150. 000	100 %	100,0 0%	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH A N DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Paten Kecamatan	82	nilai	5.340.2 00	N/ A	N/ A	N/ A	82	nilai	5.340.2 00	92, 57	nilai	5.340.2 00	112, 89%	100,0 0%	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A
	7.01.02.2 .01	KEGIATAN Penyelenggara an Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada diwilayah Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100 ,00	perse n	5.340.2 00	N/ A	N/ A	N/ A	100 ,00	perse n	5.340.2 00	100 ,00	perse n	5.340.2 00	100 %	100,0 0%	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A
	7.01.02.2 .01.02	SUB KEGIATAN Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12, 00	lapor an	5.340.2 00	N/ A	N/ A	N/ A	12, 00	lapor an	5.340.2 00	12, 00	lapor an	5.340.2 00	100 %	100,0 0%	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A

3	7.01.05	PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH N UMUM	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100 ,00	perse n	29.233. 800	N/ A	N/ A	N/ A	100 ,00	perse n	29.233. 800	100 ,00	perse n	29.233. 800	100 %	100,0 0%	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100 ,00	perse n		N/ A	N/ A	N/ A	100 ,00	perse n		100 ,00	perse n		100 %		N/ A	N/ A		N/ A	N/ A		N/ A	N/ A
	7.01.05.2 .01	KEGIATAN Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	2	lapor an	29.233. 800	N/ A	N/ A	N/ A	2	lapor an	29.233. 800	2	lapor an	29.233. 800	100 %	100,0 0%	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A
			Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4	doku men		N/ A	N/ A	N/ A	4	doku men		4	doku men		100 %		N/ A	N/ A		N/ A	N/ A		N/ A	N/ A
	7.01.05.2 .01.02	SUB KEGIATAN Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100	oran g	24.032. 400	N/ A	N/ A	N/ A	100	oran g	24.032. 400	100	oran g	24.032. 400	100 %	100,0 0%	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A
	7.01.05.2 .01.08	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam	4	lapor an	5.201.4 00	N/ A	N/ A	N/ A	4	lapor an	5.201.4 00	4	lapor an	5.201.4 00	100 %	100,0 0%	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasika n ke Instansi Terkait	100 ,00	perse n	5.460.0 00	N/ A	N/ A	N/ A	100 ,00	perse n	5.460.0 00	100 ,00	perse n	5.460.0 00	100 %	100,0 0%	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A

	7.01.04.2.02	KEGIATAN Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12	kegiatan	5.460.000	N/A	N/A	N/A	12	kegiatan	5.460.000	12	kegiatan	5.460.000	100%	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	7.01.04.2.02.01	SUB KEGIATAN Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12	laporan	5.460.000	N/A	N/A	N/A	12	laporan	5.460.000	12	laporan	5.460.000	100%	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100,00	persen	6.498.100	N/A	N/A	N/A	100,00	persen	6.498.100	100,00	persen	6.498.100	100%	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100,00	persen		N/A	N/A	N/A	100,00	persen		100,00	persen		100%		N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A
	7.01.06.2.01	KEGIATAN Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	36	dokumen	6.498.100	N/A	N/A	N/A	36	dokumen	6.498.100	36	dokumen	6.498.100	100%	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RENSTRA 2024 - 2026

No	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)								Target program dan kegiatan (Renja perangkat daerah tahun n-1) 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan						
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023							Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2024 TB II			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2		3	4			5			6			7				8=7 /6	9			10=(5+7+9)			11=(10/4)	
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		%	K		Rp	K		Rp	K	Rp
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100	persen	11.243.742.360	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	persen	3.147.099.444	50	persen	1.454.797.100	50%	13%	
	7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100	persen	114.504.600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	persen	8.757.500	50	persen	8.217.500	50%	7%	

7.01.01 .2.01.0 1	SUB KEGIATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	dokume n	55.554.600	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N/A	3	dokume n	8.217.50 0	0	dokume n	8.082.500	0%	15 %
7.01.01 .2.01.0 6	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 5	laporan	58.950.000	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N/A	5	laporan	540.000	3	laporan	135.000	20 %	0%
7.01.01 .2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase Pencairan Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu	1 0 0	persen	8.632.365. 774	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N/A	10 0,0 0	persen	2.736.19 6.394	1 0 0	persen	1.276.277. 047	10 0%	15 %
		2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	1 0 0	persen		N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N/A	10 0,0 0	persen		5 7	persen		57 %	#DI V/0 !

7.01.01 .02.01	SUB KEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6 3	orang	8.371.780.0 24	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N/A	20	orang	2.656.23 8.394	1 8	orang	1.238.788. 047	29 %	15 %
7.01.01 .02.03	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Penatausaha an dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD	3 6	dokume n	235.678.00 0	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N/A	12	dokume n	79.758.0 00	6	dokume n	37.289.000	17 %	16 %
7.01.01 .02.05	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	laporan	24.907.750	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N/A	1	laporan	200.000	1	laporan	200.000	33 %	1%
7.01.01 .2.05	Kegiatan: Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Mojoagung	1 0 0	persen	47.200.000	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N/A	10 0	persen	13.200.0 00	2 5	persen	1.794.000	25 %	4%
7.01.01 .2.05.02	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 2 8	paket	47.200.000	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N/A	16	paket	13.200.0 00	1	paket	1.794.000	1%	4%

7.01.01 .2.06.0 6	SUB KEGIATAN Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	3	dokume n	7.056.000	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N/A	1	dokume n	2.400.00 0	1	dokume n	1.200.000	33 %	17 %
7.01.01 .2.06.0 9	SUB KEGIATAN Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 2	laporan	119.553.60 0	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N/A	4	laporan	22.732.0 00	2	laporan	4.295.500	17 %	4%
7.01.01 .2.07	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	1 0 0	persen	318.797.64 6	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N/A	10 0,0 0	persen	73.765.4 40	1 0 0	persen	73.585.75 0	10 0%	23 %
7.01.01 .2.07.1 0	SUB KEGIATAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	unit	318.797.64 6	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N/A	25	unit	73.765.4 40	3 6	unit	73.585.750	12 00 %	#RE FI

7.01.01 .2.08	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah	7 0	persen	352.450.00 0	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N/A	10 0,0 0	persen	106.109. 360	5 0	persen	40.121.60 3	71 %	13 %
7.01.01 .2.08.0 2	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 0 0	laporan	86.650.000	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N/A	24	laporan	33.429.3 60	1 2	laporan	9.786.227	12 %	3%
7.01.01 .2.08.0 4	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 2	laporan	265.800.00 0	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N/A	25	laporan	72.680.0 00	1 2	laporan	30.335.376	17 %	35 %
7.01.01 .2.09	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	7 2	persen	1.355.907.3 40	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N/A	10 0,0 0	persen	99.382.1 50	5 0	persen	26.372.00 0	69 %	10 %
7.01.01 .2.09.0 2	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	1 0 0	unit	155.285.34 0	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N/A	13	unit	55.089.0 00	1	unit	21.822.000	1%	2%

		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dibayarkan Pajak dan Perizinannya																					
	7.01.01.2.09.09	SUB KEGIATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	39	unit	1.090.432.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	unit	27.343.150	0	unit	-	0%	0%
	7.01.01.2.09.10	SUB KEGIATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15	unit	110.190.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12	unit	16.950.000	8	unit	4.550.000	53%	0%
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Paten Kecamatan	75	nilai	47.681.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	82	nilai	9.022.000	0	nilai	5.923.500	0%	#REF!
	7.01.02.2.01	KEGIATAN Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	86	persen	47.681.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	persen	9.022.000	50	persen	5.923.500	58%	12%

[illegible]

			instansi terkait																					
	7.01.04 .2.02.0 1	SUB KEGIATAN Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian	100	laporan	104.271.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12	laporan	9.800.000	6	laporan	3.010.000	6%	3%
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	36	persen	77.821.800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	persen	15.498.500	50	persen	4.743.000	139%	5%
	7.01.06 .2.01	KEGIATAN Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	100	Desa	77.821.800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18	Desa	15.498.500	18	Desa	4.743.000	18%	6%

	7.01.06 .2.01.0 2	SUB KEGIATAN Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna an Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna an Aset Desa	1 8	dokume n	77.821.800	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N/A	36	dokume n	15.498.5 00	1 8	dokume n	4.743.000	10 0%	6%
6	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang perencanaan pembanguna n dan lembaga pemberdaya an masyarakat yang aktif	1 0 8	persen	316.380.00 0	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N/A	10 0	persen	43.978.2 00	5 0	persen	25.340.700	46 %	33 %
		KEGIATAN Koordinasi Kegiatan Pemberdaya an Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDDes	1 8	Desa	316.380.00 0	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N/A	18	Desa	43.978.2 00	0	Desa		0%	8%
	7.01.03 .2.01		Jumlah Lembaga/Ba dan Usaha dan Pemberdaya an Masyarakat Desa yang dibina	3 6	lembag a		N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N/A	36	lembag a		3 6	lembag a		10 0%	0%
	7.01.03 .2.01.0 1	SUB KEGIATAN Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyaraka tan yang Berpartisipas i dalam Forum Musyawarah	1 0 8	lembag a kemasy arakata n	243.337.80 0	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N/A	10 8	lembag a kemasy arakata n	14.451.6 00	1 0 8	lembag a kemasy arakata n	14.451.600	60 0%	6%

		Pembangunan di Desa	Perencanaan Pembangunan di Desa																					
		SUB KEGIATAN Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 2	laporan	73.042.200	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N/A	4	laporan	29.526.600	2	Laporan	10.889.100	17 %	15 %
						12.101.995.560													3.311.690.544			1.514.863.700	60 %	48,84 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mojoagung

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan PD sesuai dengan tugas dan fungsi. Kecamatan Mojoagung merupakan lembaga pemerintah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, oleh sebab itu maka peningkatan pelayanan Kecamatan terhadap masyarakat Kecamatan Mojoagung, baik yang terkait dengan pelayanan administrasi persuratan, fasilitasi kegiatan sosial ekonomi, pembangunan sarana prasarana maupun pemberdayaan masyarakat dalam arti yang luas adalah merupakan tugas utama.

Secara umum, dasar penyelenggaraan pelayanan publik Kecamatan Mojoagung adalah Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat. Maksud dilimpahkannya sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk mempertegas dan memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat sebagai Perangkat Daerah.

Adapun tujuan dilimpahkannya sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Camat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Mojoagung menyelenggarakan 1 (satu) Urusan yaitu Urusan Pemerintahan Fungsi penunjang Administrasi Pemerintahan dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut :

1. Capaian Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program

Sampai dengan periode triwulan IV tahun 2023 Kecamatan Mojoagung menyusun 3 dokumen perencanaan yaitu dokumen renja 2024, Perubahan Renja 2023 dan Renstra 2024-2026.

Pengendalian dan Evaluasi Program sebanyak 5 dokumen yaitu dokumen LKJiP 2022, monitoring capaian kinerja dan anggaran tribulan 1,2,3 dan 4

2. Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan

Terdapat beberapa kegiatan dalam upaya mencapai peningkatan pelayanan kecamatan yaitu terlaksananya musrenbang kecamatan, terlaksananya musrenbangdes di 18 desa, koordinasi dan patrol keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Mojoagung, terlaksananya penyebaran informasi dan penyuluhan bagi masyarakat seperti penyuluhan PSN, peringatan HUT RI, Rapat Pleno Rutin PKK setiap bulan, koordinasi penanggulangan kemiskinan melalui program BPNT, KIS, Bansos dll, pembinaan administrasi pemerintahan desa, dan penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan yang meliputi pelayanan KK, perekaman KTP, surat pindah, SKCK, dll.

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Mojoagung meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

- Memiliki kewenangan yang sangat strategis dalam bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- SDM secara kuantitatif sangat memadai
- Tersedianya sarana-prasarana kantor dalam mendukung tugas pokok dan fungsi dalam Pelayanan Masyarakat.
- Adanya ketersediaan dana yang senantiasa mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mojoagung.

- Dimilikinya pengalaman dalam menghasilkan berbagai produk perencanaan pembangunan monitoring dan evaluasi data statistik pembangunan.
- Dimilikinya pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas lain diluar tupoksi utama organisasi.

Kelemahan

- Masih kentalnya budaya PNS yang selalu menunggu perintah, kurang inovatif dan kurang kreatif.
- Belum meratanya tingkat kompetensi SDM dalam mengemban mandate kewenangan organisasi yang sangat strategis.
- Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi.
- Manajemen keuangan organisasi relative masih kurang terkelola secara optimal.
- Beberapa bentuk produk yang dihasilkan relative kurang begitu berfungsi (kualitas produk yang dihasilkan relative kurang optimal).
- Penyampaian rencana tahunan seringkali mengalami keterlambatan.
- Pelaksanaan fungsi pokok organisasi seringkali kurang focus.

2. Lingkungan Eksternal

Peluang

- Pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik
- Kerjasama dengan pengusaha swasta dalam pembangunan infrastruktur dan lingkungan kota
- Penciptaan kebijakan yang kondusif dan pro pasar
- Pembuatan kebijakan dalam rangka penataan dan pengembangan Pertanian dan sektor informal lainnya
- Transportasi terhadap produk yang dihasilkan oleh pemerintah kota

Ancaman :

- Munculnya potensi ketidakpuasan yang mengarah kepada tindakan anarkis (sebagai potensi konflik yang tinggi).
- Wujud kerjasama antar daerah secara lebih konkrit dan nyata membutuhkan waktu yang relative lama.
- In efisiensi dalam sistem transparansi kota dan adanya potensi biaya ekonomi akibat banjir dan tanah longsor.
- Tidak adanya investor yang masuk
- Kebijakan yang dihasilkan bias kepentingan pada kelompok tertentu.
- Banyaknya kebijakan kota yang terkoreksi.
- Inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan penganggaran

Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 bahwa analisis kinerja pelayanan SKPD menggunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau indikator-indikator lainnya yang sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Dalam hal ini Kecamatan Mojoagung menggunakan indikator yang mencerminkan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah sesuai dengan Renstra Kecamatan Mojoagung, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mojoagung

Tahun 2024

NO	Indikator	SPM/St andar Nasiona l	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021												
1.	Persentase rata-rata capaian kinerja aparat	-	-	100%	N/A	N/A	N/A	100%	75%	N/A	N/A	
1.1	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	-	-	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	
1.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	3 dokumen	N/A	N/A	N/A	3 dokumen	3 dokumen	N/A	N/A	
1.1.2	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	5 dokumen	N/A	N/A	N/A	5 dokumen	3 dokumen	N/A	N/A	
1.2	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	-	-	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	
	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	-	-	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	
1.2.1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	19 orang/bulan	N/A	N/A	N/A	19 orang/bulan	19 orang/bulan	N/A	N/A	
1.2.2	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	-	-	1 Laporan	N/A	N/A	N/A	1 Laporan	1 laporan	N/A	N/A	

NO	Indikator	SPM/St andar Nasiona I	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Keuangan Akhir Tahun SKPD											
1.2.3	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	12 dokumen	N/A	N/A	N/A	12 dokumen	6 dokumen	N/A	N/A	
1.3	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	-	-	100%	N/A	N/A	N/A	100%	75%	N/A	N/A	
1.3.1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	4 paket	N/A	N/A	N/A	4 paket	4 paket	N/A	N/A	
1.3.2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	33 paket	N/A	N/A	N/A	33 paket	20 paket	N/A	N/A	
1.3.3	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	1 paket	N/A	N/A	N/A	1 paket	1 paket	N/A	N/A	
1.3.4	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	2 paket	N/A	N/A	N/A	2 paket	2 paket	N/A	N/A	
1.3.5	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	1 dokumen	N/A	N/A	
1.3.6	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	4 laporan	N/A	N/A	N/A	4 laporan	2 laporan	N/A	N/A	
1.3.7	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	-	-	100%	N/A	N/A	N/A	100%	90%	N/A	N/A	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			25 unit	N/A	N/A	N/A	25 unit	25 unit	N/A	N/A	
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Mojoagung			0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	

NO	Indikator	SPM/St andar Nasiona l	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	
1.5.1	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	-	100%	N/A	N/A	N/A	100%	75%	N/A	N/A	
1.6	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	24 laporan	N/A	N/A	N/A	24 laporan	12 laporan	N/A	N/A	
1.6.2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	25 laporan	N/A	N/A	N/A	25 laporan	12 laporan	N/A	N/A	
1.6.3	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	-	-	100%	N/A	N/A	N/A	100%	80%	N/A	N/A	
1.7	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	10 unit	N/A	N/A	N/A	10 unit	50%	N/A	N/A	
1.7.1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	5 unit	N/A	N/A	N/A	5 unit	0 unit	N/A	N/A	
1.7.2	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	25 unit	N/A	N/A	N/A	25 unit	25 unit	N/A	N/A	
2.	Nilai Paten Kecamatan			85	N/A	N/A	N/A	85	0	N/A	N/A	
2.1	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar			100 persen	N/A	N/A	N/A	100 persen	80%	N/A	N/A	
2.1.1	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 laporan	N/A	N/A	N/A	12 laporan	7 laporan	N/A	N/A	

NO	Indikator	SPM/St andar Nasiona l	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	-	-	100 persen	N/A	N/A	N/A	100 persen	0 persen	N/A	N/A	
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang Ditindaklanjuti	-	-	100 persen	N/A	N/A	N/A	100 persen	50 persen	N/A	N/A	
3.1	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	-	-	2 laporan	N/A	N/A	N/A	2 laporan	0 laporan	N/A	N/A	
	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	-	-	4 dokumen	N/A	N/A	N/A	4 dokumen	2 laporan	N/A	N/A	
3.1.1	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-	-	100 orang	N/A	N/A	N/A	100 orang	0 orang	N/A	N/A	
3.1.2	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	4 dokumen	N/A	N/A	N/A	4 dokumen	2 dokumen	N/A	N/A	
4	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait			100 persen	N/A	N/A	N/A	100 persen	50%	N/A	N/A	
4.1	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan			12 kegiatan	N/A	N/A	N/A	12 kegiatan	7 kegiatan	N/A	N/A	
4.1.2	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.			12 laporan	N/A	N/A	N/A	12 laporan	7 laporan	N/A	N/A	
5.	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa			100 persen	N/A	N/A	N/A	100 persen	100%	N/A	N/A	
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti			100persen	N/A	N/A	N/A	100persen	50 %	N/A	N/A	

NO	Indikator	SPM/St andar Nasiona I	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa			36 dokumen	N/A	N/A	N/A	36 dokumen	18 dokumen	N/A	N/A	
5.1.1	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desaa			36 dokumen	N/A	N/A	N/A	36 dokumen	18 dokumen	N/A	N/A	
6.	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	-	-	100 persen	N/A	N/A	N/A	100 persen	50%	N/A	N/A	
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	-	-	36 lembaga	N/A	N/A	N/A	36 lembaga	36 lembaga	N/A	N/A	
6.1	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	-	-	36 lembaga	N/A	N/A	N/A	36 lembaga	36 lembaga	N/A	N/A	
6.2	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	12 laporan	N/A	N/A	N/A	12 laporan	6 laporan	N/A	N/A	
RENSTRA PD 2024 – 2026 (KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023)												
1	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur			N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	
1.1	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan			N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	
1.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			N/A	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	N/A	N/A	2 dokumen	2 dokumen	
1.1.2	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			N/A	5 laporan	5 laporan	5 laporan	N/A	N/A	5 laporan	5 laporan	
1.2	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu			N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	

36

NO	Indikator	SPM/St andar Nasiona l	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan			N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	
1.2.1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			N/A	21 orang	21 orang	21 orang	N/A	N/A	21 orang	21 orang	
1.2.2	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			N/A	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	N/A	N/A	12 dokumen	12 dokumen	
1.2.3	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			N/A	1 laporan	1 laporan	1 laporan	N/A	N/A	1 laporan	1 laporan	
1.3	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Mojoagung			N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	
1.3.1	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			N/A	46 paket	40 paket	40 paket	N/A	N/A	46 paket	40 paket	
1.4	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	
1.4.1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			N/A	10 paket	12 paket	12 paket	N/A	N/A	10 paket	12 paket	
1.4.2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			N/A	33 paket	35 paket	35 paket	N/A	N/A	33 paket	35 paket	
1.4.3	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			N/A	1 paket	1 paket	1 paket	N/A	N/A	1 paket	1 paket	
1.4.4	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			N/A	2 paket	2 paket	2 paket	N/A	N/A	2 paket	2 paket	
1.4.5	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			N/A	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	N/A	N/A	1 dokumen	1 dokumen	
1.4.6	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			N/A	4 laporan	4 laporan	4 laporan	N/A	N/A	4 laporan	4 laporan	

NO	Indikator	SPM/St andar Nasiona l	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur			N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	
1.5.1	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			N/A	5 unit	5 unit	5 unit	N/A	N/A	5 unit	5 unit	
1.6	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	
1.6.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			N/A	24 laporan	24 laporan	24 laporan	N/A	N/A	24 laporan	24 laporan	
1.6.2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			N/A	24 laporan	24 laporan	24 laporan	N/A	N/A	24 laporan	24 laporan	
1.7	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik			N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	
1.7.1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			N/A	13 unit	13 unit	13 unit	N/A	N/A	13 unit	13 unit	
1.7.2	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			N/A	5 unit	5 unit	5 unit	N/A	N/A	5 unit	5 unit	
1.7.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			N/A	20 unit	25 unit	25 unit	N/A	N/A	20 unit	25 unit	
2.	Nilai Paten Kecamatan			N/A	84.5	85	85	N/A	N/A	84.5	85	
2.1	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar			N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	
2.1.1	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			N/A	12 laporan	12 laporan	12 laporan	N/A	N/A	12 laporan	12 laporan	

NO	Indikator	SPM/St andar Nasiona l	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan			N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti			N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	
3.1	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan			N/A	5 laporan	5 laporan	5 laporan	N/A	N/A	5 laporan	5 laporan	
	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam			N/A	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	N/A	N/A	4 dokumen	4 dokumen	
3.1.1	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			N/A	100 orang	100 orang	100 orang	N/A	N/A	100 orang	100 orang	
3.1.2	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			N/A	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	N/A	N/A	4 dokumen	4 dokumen	
4.	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait			N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	
4.1	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait			N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	
4.1.1	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.			N/A	12 laporan	12 laporan	12 laporan	N/A	N/A	12 laporan	12 laporan	
5.	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu			N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	
5.1	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap			N/A	18 desa	18 desa	18 desa	N/A	N/A	18 desa	18 desa	
5.1.1	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			N/A	36 dokumen	36 dokumen	36 dokumen	N/A	N/A	36 dokumen	36 dokumen	

NO	Indikator	SPM/St andar Nasiona l	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif			N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	
6.1	Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina			N/A	36 lembaga	36 lembaga	36 lembaga	N/A	N/A	36 lembaga	36 lembaga	
	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes			N/A	18 desa	18 desa	18 desa	N/A	N/A	18 desa	18 desa	
6.1.1	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			N/A	4 laporan	4 laporan	4 laporan	N/A	N/A	4 laporan	4 laporan	
6.1.2	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa			N/A	108 lembaga	108 lembaga	108 lembaga	N/A	N/A	108 lembaga	108 lembaga	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

1. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD

Tingkat Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Mojoagung dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Mojoagung telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Mojoagung.

2. Isu-isu strategis pembangunan Jombang yang sejalan dengan Tupoksi Kecamatan Mojoagung dapat dikategorikan dalam uraian-uraian dibawah ini:

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik masih sangat minim untuk mendukung pelayanan menuju Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik yang kurang di Kecamatan Mojoagung adalah sarana bermain anak yang memadai, area parkir yang aman dan nyaman dan kantin pelayanan.

2. Penyusunan RKPDes tidak tepat waktu

Desa masih terlambat dalam penyusunan RKPDes, seharusnya RKPDes disusun paling lambat tanggal 30 September masih banyak Desa yang belum mengumpulkan RKPDes. Karena kurangnya koordinasi antara pihak DPMD, Kecamatan serta desa sangat mempengaruhi keterlambatan dalam penyusunan RKPDes.

3. Pembinaan Badan Usaha dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kurangnya pembinaan Desa terhadap Badan Usaha dan Lembaga Pemberdayaan Desa sehingga kurang berkembang dan tidak dapat berjalan sebagaimana fungsinya.

4. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBDes tidak tepat waktu

Desa dalam menyusun laporan Pertanggungjawaban APBDes masih terlambat seharusnya Laporan Pertanggungjawaban APBDes di susun dan dilaporkan ke kecamatan paling lambat 3 minggu setelah berakhir tahun anggaran.

5. Kompetensi Aparatur Pelayanan Publik

Masih rendahnya kualitas dan kompetensi SDM yang ada di Kecamatan Mojoagung karena masih minimnya diklat dan bimbingan teknis yang dapat diikuti oleh pegawai.

6. Kurangnya kesadaran masyarakat di Kecamatan Mojoagung untuk tertib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), wilayah Kecamatan Mojoagung sudah bergerak kearah ekonomi maju dengan mayoritas penduduknya tidak hanya mengandalkan sektor pertanian saja tetapi juga sektor industri dan perdagangan. Akan tetapi kondisi ini tidak diimbangi dengan tingkat kesadaran masyarakat untuk tertib membayar pajak.

7. Masih terdapat pendiskriminasian terhadap isu gender maupun kekerasan pada anak sehingga diperlukan berbagai upaya mengatasi permasalahan isu gender agar masyarakat memahami bahwa kesetaraan perempuan dan laki laki adalah sama.

Dari deskripsi permasalahan-permasalahan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa isu strategis kecamatan adalah **“Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan”**.

Keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mojoagung pada tahun 2024 adalah merupakan upaya dalam mencapai target dan sasaran pembangunan dimana hal tersebut telah ditetapkan di dalam Tujuan RPD Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 yakni untuk menghasilkan produk-produk perencanaan yang berkualitas dan akuntabel, dalam artian bahwa perencanaan pembangunan dilakukan dengan terukur dan tepat sasaran, baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga memudahkan didalam proses monitoring, evaluasi maupun pengendalian serta nantinya diharapkan dapat memberikan arah dan kebijakan dalam mengatasi permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terjadi pada tahun berjalan.

3. Dampaknya terhadap pencapaian Tujuan RPD adalah:

- a. Terhambatnya pemenuhan target dan sasaran yang telah ditetapkan didalam RPD Kab. Jombang Tahun 2024-2026.
- b. Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan yang berdampak pada kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat dan tingkat kesejahteraan.
- b. Anggaran dana yang tertuang dalam DPA Kecamatan Mojoagung belum dapat mengakomodir seluruh kebutuhan sehingga berdampak pada pencapaian prioritas pembangunan daerah kelima yang tertuang dalam dokumen RPD Kab. Jombang tahun 2024 yakni mewujudkan pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang berkualitas melalui digitalisasi proses layanan

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Tantangan :

- a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan;
- b. Jaringan Internet yang masih terkadang crowded berpengaruh pada terhambatnya proses pelayanan kepada masyarakat;
- c. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan;
- d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkualitas terkait dengan peningkatan pelayanan publik;
- e. Perubahan KTP SIAK menjadi e-KTP di Kecamatan Mojoagung saat ini belum bisa maksimal dikarenakan perangkat perekaman e-KTP terkadang tidak dapat dioperasikan yakni alat perekaman sidik jari dan iris mata terkadang trouble sehingga pemohon disarankan untuk perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jombang;
- f. Pemohon KK dan e-KTP di wilayah Kecamatan Mojoagung cukup banyak, sedangkan petugas operator hanya 2 (dua) orang, yang menangani cetak KK, Pengantar KK dan e-KTP (Barcode).
- g. Blangko e-KTP masih sering kosong sehingga pelayanan masih kurang maksimal.

Peluang :

- a. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;
- b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang pemeliharaan secara berkala;
- c. Mengikutsertakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan;
- d. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan;

- e. Untuk memperkuat kapasitas dan menjaga motivasi kerja pegawai diperlukan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan, sebagai upaya merespon tuntutan eksternal untuk selalu memperbaiki kinerja serta optimalisasi dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern dan pengawasan melekat.

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Mojoagung terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:

a. Perencanaan Pembangunan

Dalam Perencanaan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2025, telah dilaksanakan melalui kegiatan Musrenbangcam, tetapi masih terdapat beberapa usulan yang belum terealisasi, dikarenakan terbatasnya anggaran pada APBD Kab. Jombang.

- Diperlukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dengan melibatkan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan rencana strategis tahun 2024-2026 sehingga menghasilkan output yang lebih aspiratif.
- Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir sebagai modal database dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

b. Keamanan dan Ketertiban

Setiap tahun OPD Kecamatan Mojoagung dalam bidang keamanan dan ketertiban melakukan penertiban, pembinaan, pemantauan sehingga wilayah Kecamatan Mojoagung dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif dan untuk meningkatkan kinerja perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung.

- c. **Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**
Pada Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II, telah berhasil dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Mojoagung melalui 1 (satu) Program rutin dan 5 (lima) program Tugas dan Fungsi Kecamatan
- d. **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
Diperlukan pembinaan lebih intensif dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa agar potensi yang ada dapat lebih berkembang serta dapat bersaing di era globalisasi diantaranya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), perdagangan transnasional, serta perkembangan teknologi informasi.
- e. **Urusan Perempuan dan Perlindungan Anak**
Belum maksimalnya kesetaraan gender di bidang politik dan ekonomi maupun belum optimalnya jejaring kelembagaan masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak. Untuk itu diperlukan pendampingan secara berkelanjutan agar tingkat kesetaraan gender dan perlindungan anak terutama di wilayah kecamatan Mojoagung semakin tinggi. Dengan melibatkan masyarakat dan memberi kesempatan kepada perempuan untuk turut serta dalam kegiatan perencanaan pembangunan di Kecamatan misalnya dalam Musrenbangcam, Forum Perangkat Daerah maupun kegiatan pemberdayaan lainnya.

Sejauh ini tingkat kinerja Kecamatan Mojoagung sampai dengan akhir triwulan II tahun 2024 sebagaimana yang telah ditargetkan dapat direalisasikan dengan baik.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2024 yang merupakan bagian Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang berpedoman pada arah

kebijakan tahap akhir periodisasi 2005-2025 dari dokumen RPJPD menjadi acuan dalam penyusunan Renja Kecamatan Mojoagung Tahun 2025. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

- a) Rancangan kerangka ekonomi daerah
 - b) Program prioritas pembangunan daerah dan
 - c) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.
1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang Prasarana Wilayah dan Bidang Ekonomi untuk setiap tahun anggaran.
 2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat (prosedur Button Up).
 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program-program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan melihat kondisi yang berkembang di masyarakat. Untuk lebih meningkatkan kinerja Kecamatan Mojoagung diperlukan aparatur yang cerdas, terampil, bertanggungjawab, inovatif dan kapabel. Hal tersebut berarti aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip clean government dan good governance.

Rencana Kerja Kecamatan Mojoagung berdasarkan RKPD Kabupaten Jombang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se

Kabupaten Jombang yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Mojoagung.

Adapun terdapat perubahan Tema Pembangunan Daerah Tahun 2024 sesuai dengan RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024 – 2026 yang menyusun Tema pembangunan daerah ” Hilirisasi Agrobisnis”.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2025 adalah:

1. Peningkatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pemenuhan Layanan Dasar dan Kehidupan Yang Harmonis;
2. Peningkatan Layanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas;
3. Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan dan Merata.

Adapun Rancangan Awal RKPD dan Rancangan Final RKPD Tahun 2025 bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut :

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, dalam hal ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa stakeholder yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun OPD Kabupaten. Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Kecamatan Mojoagung sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

Rancangan rencana kerja Kecamatan Mojoagung didiskusikan dalam pembahasan Forum SKPD tingkat Kecamatan. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan.

Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Usulan program dan kegiatan masyarakat telah diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mojoagung dengan mempertimbangkan aspek-aspek kajian kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan jumlah anggaran, serta tantangan yang dihadapi dan peluang yang dapat dioptimalkan.

Dari proses penyelarasan beberapa isu penting yang diekspose dalam dokumen ini dengan usulan program dan kegiatan masyarakat, telah dituangkan beberapa kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 yang berkaitan dengan :

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana strategis yang bersifat aspiratif, maka akan diadakan Focus Group Discussion (FGD) dalam penyusunan Renstra.

- b. Pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan adalah meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program di seluruh Desa.
- c. Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir sebagai bahan dalam penyusunan sinergitas kecamatan, dengan mengoptimalkan peran perangkat desa yang dinamis sebagai petugas collecting data,
- d. Pemerataan pembangunan fisik untuk mereduksi ketimpangan perkembangan pembangunan antar wilayah sekaligus memberdayakan sumber daya lokal melalui kegiatan padat karya.

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Mojoagung pada tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

- 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
- 2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
- 3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
- 4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan Kecamatan Mojoagung maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

Adapun data usulan program dan kegiatan untuk Kecamatan Mojoagung pada Tahun 2025 sesuai hasil Musrenbang Kecamatan seperti pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5

Usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari para pemangku kepentingan
Tahun 2025 Kabupaten Jombang

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Pembangunan Sumur Dangkal dan Sarana Prasarana	Desa Karangwinongan Desa Tejo Desa Betek	Terbangunnya sumur dangkal	1 paket 1 paket 1 paket	PIK
2.	Pembangunan PJU di Jalan Kabupaten	Desa Tanggalrejo Desa Janti	Terbangunnya PJU	1 paket 1 paket	PIK
3.	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	Desa Johowinong Desa Miagan Desa Dukuhdimoro Desa Kademangan	Terbangunnya JITUT	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	PIK
4.	Peningkatan Jalan Kabupaten	Desa Karobelah	Terbangunnya jalan	1 paket	PIK

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Prioritas Pembangunan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*.

Rencana kerja Pemerintah (RKP) 2025 bertema , "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan," yang dijabarkan ke dalam 5 prioritas pembangunan nasional (PN):

1. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa
2. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi
3. percepatan infrastruktur IKN
4. reformasi pengelolaan sampah
5. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

1.1.2 Prioritas Pembangunan Propinsi

Tema/ arah pembangunan daerah tahun 2025 adalah "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan" yang dijabarkan dalam 4 prioritas pembangunan Propinsi Jawa Timur Tahun 2025 adalah :

1. Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial ;
2. Perluasan lapangan kerja dan membangun keunggulan ekonomi ;
3. Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor pendidikan dan kesehatan;
4. Keterpaduan pengembangan wilayah;
5. Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas;
6. Pembangunan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan berbasis kerakyatan;
7. Pembangunan ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM, koperasi, Bumdesa dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa;
8. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan anti korupsi;
9. Menjaga harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup.

1.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang

Rencana kerja Daerah harus sejalan dengan rencana kerja pemerintah oleh karena itu tema/ arah pembangunan daerah tahun 2025 adalah “Hilirisasi Agrobisnis” yang dijabarkan dalam 3 prioritas pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2025 adalah:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pemenuhan Layanan Dasar dan Kehidupan Yang Harmonis;
2. Peningkatan Layanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas;
3. Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan dan Merata

Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Mojoagung dalam kurun waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2025 dimana merupakan bagian Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026. Pada tahun 2025 terdapat 3 (tiga) prioritas pembangunan, dengan tema/arah pembangunan daerah pada tahun 2025 yaitu **“Hilirisasi Agrobisnis”**.

Guna mendukung Arah Pembangunan Daerah tersebut maka dalam menjalankan tugasnya ditetapkan tujuan dan sasaran dari Rencana Kerja OPD, dimana tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, maka tujuan yang ingin dicapai dari Renja tahun 2025 adalah Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi

dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Mojoagung dan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran OPD Kecamatan Mojoagung tahun 2025 adalah Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan dan Meningkatnya kualitas Layanan Publik, dengan Indikator Sasaran sebagai berikut :

1. Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan
2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Mojoagung.

Adapun Tujuan dan Sasaran Kinerja Kecamatan Mojoagung Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan table sebagai berikut :

Tabel 3.1

No	Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Tujuan/ Sasaran OPD	2025
1.	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Mojoagung	62
			Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan	74
		Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten	63,45
			Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Mojoagung	8,41

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

➤ **Pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah**

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Mojoagung diarahkan untuk mencapai Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik dengan sasaran RPD adalah “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi” yang selaras dengan tujuan OPD yaitu “Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi”

➤ **Pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals)**

SDGs adalah merupakan program pembangunan yang berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dengan tenggat waktu yang ditentukan. SDGs merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target SDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Mojoagung diimplentasikan untuk mencapai target-target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

➤ **Pemberantasan Kemiskinan**

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Jombang. Demikian pula halnya dengan penanggungan kemiskinan di Kecamatan Mojoagung. Program dan kegiatan yang dirancang pada RENJA 2025 PD KECAMATAN MOJOAGUNG yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses/fasilitasi dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

➤ **Pencapaian SPM**

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar. Sesuai dengan PP Nomor

2 tahun 2018 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat control terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Mojoagung diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

□ **Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah**

Kecamatan Mojoagung sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Jombang memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan pembuatan lis, cor kuningan, pengrajin sepatu, dan sektor pertanian baik padi, jagung, sayur, tebu pada musim tertentu. Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Mojoagung melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini. Untuk mendukung hal tersebut, pada perencanaan kerja tahun 2025 Kecamatan Mojoagung akan mengadakan acara “**Gelar Potensi Kecamatan Tahun 2025**” yang akan dilaksanakan sebagai bentuk

dukungan dalam meningkatkan dan menggali potensi potensi UMKM di wilayah Kecamatan Mojoagung agar semakin dikenal luas oleh masyarakat secara langsung dan memberikan manfaat terutama para pelaku UMKM maupun roda perputaran ekonomi.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Mojoagung maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2025 dan sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 dan KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
- c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
- d. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
- f. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

3.3.1. Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 2.3 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 4.1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- 4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 4.6 Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 5.1 Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 7.2 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 7.3 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- 1. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan**
 - 1.1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

III. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- 1. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**
 - 1.1 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - 1.2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

IV. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 1. **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
 - 1.1 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

V. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- 1.1** Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- 1.2** Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- 1.3** Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

VI. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1.** Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - 1.1** Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

➤ Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Dari 6 (empat) program dan 12 kegiatan dan 25 sub kegiatan yang direncanakan pada tahun 2024 untuk dilaksanakan di Kecamatan Mojoagung sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Mojoagung dan melingkupi semua Desa (18 Desa).

➤ Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Sumber pendanaan seluruh program dan kegiatan pada Renja 2024 berasal dari APBD Kab. Jombang dengan jumlah seluruhnya adalah Rp. 3.457.412.431,-

Tabel 3.2

Rumusan rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kecamatan Mojoagung

Kode	Urusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun rencana 2025)				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Kec. Mojoagung	100%	3.152.305.081,00	APBD Kab		100%	3.206.383.394,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	Kec. Mojoagung	100%	12.332.500,00	APBD Kab		100%	12.585.000,00
7.01.01.2.01.0001	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Mojoagung	2 dokumen	10.145.000,00	APBD Kab		2 dokumen	8.085.000,00
7.01.01.2.01.0006	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kec. Mojoagung	5 laporan	2.187.500,00	APBD Kab		5 laporan	4.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun rencana 2025)				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
7.01.01.2.0002	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Kec. Mojoagung	100%	2.769.498.921,00	APBD Kab		100%	2.656.238.394,00
		2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	Kec. Mojoagung	100%		APBD Kab		100%	
7.01.01.2.02.0001	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Mojoagung	20 orang	2.690.980.921,00	APBD Kab		21 orang	2.656.238.394,00
7.01.01.2.02.0003	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Mojoagung	12 dokumen	78.318.000,00	APBD Kab.		12 dokumen	80.000.000,00
7.01.01.2.02.0005	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Kec. Mojoagung	1 laporan	200.000,00	APBD Kab		1 laporan	1.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun rencana 2025)				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Mojoagung	Kec. Mojoagung	100%	16.200.000,00	APBD Kab		100%	36.000.000,00
7.01.01.2.05.0002	1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Mojoagung	46 paket	16.200.000,00	APBD Kab		46 paket	16,400,000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Mojoagung	100%	98.612.000,00	APBD Kab		100%	131.140.000,00
7.01.01.2.06.0001	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Mojoagung	9 paket	897.900,00	APBD Kab.		15 paket	2.500.000,00
7.01.01.2.06.0002	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Mojoagung	29 paket	15.773.600,00	APBD Kab		37 paket	25.000.000,00
7.01.01.2.06.0004	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Mojoagung	1 paket	50.820.000,00	APBD Kab		1 paket	53.240.000,00

Kode	Urusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun rencana 2025)				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7.01.01.2.06.0005	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Mojoagung	2 paket	4.460.500,00	APBD Kab		2 paket	8.000.000,00
7.01.01.2.06.0006	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Mojoagung	1 dokumen	2.352.000,00	APBD Kab		1 dokumen	2.400.000,00
7.01.01.2.06.0009	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Mojoagung	4 laporan	24.308.000,00	APBD Kab		4 laporan	38,346,550
7.01.01.2.07	Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Kec. Mojoagung	100%	69.587.787,00	APBD Kab		100%	90.000.000,00
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Mojoagung	1 unit		APBD Kab		1 unit	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kec. Mojoagung	6 unit	69.587.787,00	APBD Kab		10 unit	100,000,000

Kode	Urusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun rencana 2025)				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	Kantor atau Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Mojoagung	100%	109.155.173,00	APBD Kab		100%	112.420.000,00
7.01.01.2.08.0002	1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Mojoagung	24 laporan	32.874.324,00	APBD Kab		24 laporan	32.420.000,00
7.01.01.2.08.0004	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Mojoagung	24 laporan	76.280.849,00	APBD Kab		24 laporan	80.000.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Kec. Mojoagung	100%	76.918.700,00	APBD Kab		100%	87.000.000,00
7.01.01.2.09.0002	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Mojoagung	13 unit	48.141.700,00	APBD Kab		13 unit	52.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun rencana 2025)				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7.01.01.2.09.0009	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Mojoagung	5 gedung	9.117.000,00	APBD Kab		5 gedung	15.000.000,00
7.01.01.2.09.0010	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Mojoagung	20 unit	19.660.000,00	APBD Kab		20 unit	20.000.000,00
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	Kec. Mojoagung	84,5	6.617.700,00	APBD Kab		85	20.000.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	Kec. Mojoagung	100%	6.617.700,00	APBD Kab		100%	20.000.000,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Mojoagung	12 laporan	6.617.700,00	APBD Kab		12 laporan	20.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun rencana 2025)				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	Kec. Mojoagung	100%	154.548.800,00	APBD Kab		100%	87.000.000,00
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	Kec. Mojoagung	100%		APBD Kab		100%	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	Kec. Mojoagung	5 laporan	154.548.800,00	APBD Kab		5 laporan	87.000.000,00
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	Kec. Mojoagung	4 dokumen		APBD Kab		4 dokumen	
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Mojoagung	100 orang	104.691.800,00	APBD Kab		100 orang	40.000.000,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Mojoagung	4 dokumen	49.857.000,00	APBD Kab		4 dokumen	47.000.000,00
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan	Kec. Mojoagung	100%	4.165.000,00	APBD Kab		100%	10.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun rencana 2025)				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
		Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait							
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	Kec. Mojoagung	100%	4.165.000,00	APBD Kab		100%	10.000.000,00
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Mojoagung	12 laporan	4.165.000,00	APBD Kab		12 laporan	10.000.000,00
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	Kec. Mojoagung	100%	8.605.200,00	APBD Kab		100%	17.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun rencana 2025)				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	Kec. Mojoagung	18 desa	8.605.200,00	APBD Kab		18 desa	17.000.000,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Mojoagung	36 dokumen	8.605.200,00	APBD Kab		36 dokumen	17.000.000,00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	Kec. Mojoagung	100%	131.170.650,00	APBD Kab		100%	105,460,200
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	Kec. Mojoagung	36 lembaga	131.170.650,00	APBD Kab		36 lembaga	45.000.000,00
		Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	Kec. Mojoagung	18 desa		APBD Kab		18 desa	

Kode	Urusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun rencana 2025)				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Mojoagung	4 laporan	120.202.950,00	APBD Kab		4 laporan	30.000.000,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Kec. Mojoagung	108 lembaga	10.967.700,00	APBD Kab		108 lembaga	15.000.000,00
	JUMLAH				3.457.412.431,00	JUMLAH			3.375.383.394,00

3.3.3 Indikator masukan, Keluaran dan hasil Setiap Program Kegiatan sesuai dengan indikator kunci keberhasilan (IKK)

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1 Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Capaian Program : Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur

Masukan : Dana yang dibutuhkan Rp. 10.145.000,00

Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Hasil Kegiatan : Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan

1.2 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Capaian Program : Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur

Masukan : Dana yang dibutuhkan Rp. 2.187.500,00

Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Hasil Kegiatan : Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan

2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.1 Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Capaian Program : Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur

Masukan : Dana yang dibutuhkan Rp. 2.690.980.921,00

Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Hasil Kegiatan : Persentase Pencairan Gaji dan Tunjangan ASN Tepat waktu

2.2 Sub Kegiatan : Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD

Capaian Program : Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur

Masukan : Dana yang dibutuhkan Rp. 78.318.000,-

Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Hasil Kegiatan : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.2 Sub Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

Capaian Program : Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur

Masukan : Dana yang dibutuhkan Rp. 200.000,-

Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Hasil Kegiatan : Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan

3. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

2.1 Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Capaian Program : Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur

Masukan : Dana yang dibutuhkan Rp. 16.200.000,-

Keluaran : Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut Kelengkapan

Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Mojoagung.

4. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

3.1 Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Capaian Program : Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur

Masukan : Dana yang dibutuhkan Rp. 15.773.600,00

Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

3.2 Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Capaian Program : Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur

Masukan : Dana yang dibutuhkan Rp. 897.600,-

Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

3.3 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Capaian Program : Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur

Masukan : Dana yang dibutuhkan Rp. 50.820.000,-

Keluaran : Jumlah Paket bahan logistik kantor yang Disediakan

Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

3.4 Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Capaian Program : Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur

Masukan : Dana yang dibutuhkan Rp. 4.460.500,-

Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan

Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

3.5 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Capaian Program : Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur

Masukan : Dana yang dibutuhkan Rp. 2.352.000,-

Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

3.6 Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Capaian Program : Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur

Masukan : Dana yang dibutuhkan Rp. 24.308.000,-

Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

5. Kegiatan : Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah

4.1 Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Capaian Program : Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur

Masukan : Dana yang dibutuhkan Rp. 69.587.787,-

Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

Hasil Kegiatan : Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur

6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5.1 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Capaian Program : Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur

Masukan : Dana yang dibutuhkan Rp. 32.874.324,-

Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah

5.2 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Capaian Program : Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur

Masukan : Dana yang dibutuhkan Rp. 76.280.849,-
Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah

7. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.1 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan

Capaian Program : Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur

Masukan : Dana yang dibutuhkan Rp. 48.141.700,-
Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Hasil Kegiatan : Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik

6.2 Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Capaian Program : Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur

Masukan : Dana yang dibutuhkan Rp. 9.117.000,-

Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi

Hasil Kegiatan : Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik

6.3 Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Capaian Program : Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur

Masukan : Dana yang dibutuhkan Rp. 19.660.000,-

Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi

Hasil Kegiatan : Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1.1 Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Capaian Program : Nilai Paten Kecamatan

Masukan : Dana yang dibutuhkan Rp. 6.617.700,-

Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Hasil Kegiatan : Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

1.1 Sub Kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Capaian Program :

1. Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan
2. Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti

Masukan : Dana yang dibutuhkan Rp. 104.691.800,-

Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Hasil Kegiatan :

1. Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan
2. Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam

1.2 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Capaian Program :

1. Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan
2. Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti

Masukan : Dana yang dibutuhkan Rp. 49.857.000,-

Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi
Pimpinan di Kecamatan

Hasil Kegiatan :

1. Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan
2. Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- 1.1 Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Capaian Program : Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait

Masukan : Dana yang dibutuhkan Rp. 4.165.000,-

Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hasil Kegiatan : Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 1.1 Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Capaian Program :

1. Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu

Masukan : Dana yang dibutuhkan Rp. 8.605.200,-

Keluaran : Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Hasil Kegiatan : Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1.1 Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Capaian Program : Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif

Masukan : Dana yang dibutuhkan Rp. 120.202.950,-

Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Hasil Kegiatan : 1. Jumlah Desa yang menyusun RKPDes

2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina

1.2 Sub Kegiatan : Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Capaian Program : Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif

Masukan : Dana yang dibutuhkan Rp. 10.967.700,-

Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Hasil Kegiatan : 1. Jumlah Desa yang menyusun RKPDes

2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Mojoagung Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2025 sebagai acuan bagi OPD dan masyarakat yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025 harus benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 yang mengacu pada Renstra Kecamatan Mojoagung memiliki 6 (enam) program yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu 1 (satu) program kesekretariatan dan 5 (lima) program tugas pokok dan

fungsi. Program kesekretariatan memiliki 8 (Delapan) kegiatan 18 (delapan belas) sub kegiatan dan program teknis memiliki 5 (Lima) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan. Program dan kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan
Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Kecamatan Mojoagung	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	3.152.305.081,00	DAU
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mojoagung	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	12.332.500,00	DAU
7.01.01.2.01.0001	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Mojoagung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	10.145.000,00	DAU
7.01.01.2.01.0006	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Mojoagung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	2.187.500,00	DAU
7.01.01.2.01.0002	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Mojoagung	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	2.769.498.921,00	DAU
		Kecamatan Mojoagung	2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%		DAU
7.01.01.2.02.0001	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Mojoagung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang	2.690.980.921,00	DAU
7.01.01.2.02.0003	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kecamatan Mojoagung	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	78.318.000,00	DAU
7.01.01.2.02.0005	3. Koordinasi dan penyusunan laporan	Kecamatan Mojoagung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	200.000,00	DAU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
	keuangan akhir tahun SKPD		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Mojoagung	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Mojoagung	100%	16.200.000,00	DAU
7.01.01.2.05.0002	1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kecamatan Mojoagung	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	46 paket	16.200.000,00	DAU
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Mojoagung	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	98.612.000,00	DAU
7.01.01.2.06.0001	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Kecamatan Mojoagung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 paket	897.900,00	DAU
7.01.01.2.06.0002	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Mojoagung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 paket	15.773.600,00	DAU
7.01.01.2.06.0004	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Mojoagung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	50.820.000,00	DAU
7.01.01.2.06.0005	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Mojoagung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	4.460.500,00	DAU
7.01.01.2.06.0006	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Mojoagung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.352.000,00	DAU
7.01.01.2.06.0009	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Mojoagung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	24.308.000,00	DAU
7.01.01.2.07	Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Kecamatan Mojoagung	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	69.587.787,00	DAU
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Kecamatan Mojoagung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung	6 unit	69.587.787,00	DAU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
	Kantor atau Bangunan Lainnya		Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mojoagung	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	109.155.173,00	DAU
7.01.01.2.08.0002	1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Kecamatan Mojoagung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	32.874.324,00	DAU
7.01.01.2.08.0004	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Mojoagung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 laporan	76.280.849,00	DAU
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mojoagung	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	76.918.700,00	DAU
7.01.01.2.09.0002	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kecamatan Mojoagung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	48.141.700,00	DAU
7.01.01.2.09.0009	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Mojoagung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 gedung	9.117.000,00	DAU
7.01.01.2.09.0010	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Mojoagung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	19.660.000,00	DAU
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Mojoagung	Nilai Paten Kecamatan	84,5	6.617.700,00	DAU
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Mojoagung	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	6.617.700,00	DAU
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Kecamatan Mojoagung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12 laporan	6.617.700,00	DAU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Mojoagung	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	154.548.800,00	DAU
		Kecamatan Mojoagung	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%		DAU
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Mojoagung	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	5 laporan	154.548.800,00	DAU
		Kecamatan Mojoagung	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen		DAU
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Mojoagung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	104.691.800,00	DAU
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Mojoagung	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	49.857.000,00	DAU
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Mojoagung	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	4.165.000,00	DAU
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Mojoagung	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	4.165.000,00	DAU
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian	Kecamatan Mojoagung	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	12 laporan	4.165.000,00	DAU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
	Negara Republik Indonesia		dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.			
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Mojoagung	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	8.605.200,00	DAU
7.01.06.2.0.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Mojoagung	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	18 desa	8.605.200,00	DAU
7.01.06.2.0.1.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Mojoagung	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36 dokumen	8.605.200,00	DAU
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Mojoagung	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	131.170.650,00	DAU
7.01.03.2.0.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Mojoagung	Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	36 lembaga	131.170.650,00	DAU
		Kecamatan Mojoagung	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	18 desa		DAU
7.01.03.2.0.1.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mojoagung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	120.202.950,00	DAU
7.01.03.2.0.1.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Mojoagung	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	108 lembaga	10.967.700,00	DAU
JUMLAH TOTAL					3.457.412.431,00	

Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Mojoagung Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 3.457.412.431,00 yang bersumber dari Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum. Adapun untuk perincian kegiatan Sebagai berikut :

Tabel 4.2
Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran
1	Belanja Operasi	2.699.711.134,00
2	Belanja Pegawai	2.769.298.921,00
3	Belanja Barang	687.483.510,00
4	Belanja Modal	69.587.787,00
5	Belanja Peralatan dan Mesin	0,00
6	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00
7	JUMLAH BELANJA	3.457.412.431,00

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mojoagung Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mojoagung Tahun 2024-2026 tahun 2025 yang mengacu pada Tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Jombang “**Hilirisasi Agrobisnis**”.dan mengacu pada evaluasi RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024 – 2026 serta sesuai tugas pokok dan fungsi OPD sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mojoagung yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Mojoagung. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Mojoagung di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, diantaranya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang RPJPD Tahun 2005-2025.

1.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Mojoagung berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mojoagung Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2025.
- b. Kecamatan Mojoagung berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Mojoagung Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Mojoagung Tahun 2025 dan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2025.
- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Mojoagung Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025.

1.3 Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mojoagung selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Mojoagung. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Mojoagung Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Renja Kecamatan Mojoagung juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik. Semoga keberadaan Renja Kecamatan Mojoagung ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya tujuan dan sasaran Kecamatan

Mojoagung serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Jombang.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 atau tahun pertama, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat.
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi.

Demikian Dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Mojoagung Tahun Anggaran 2025 yang dapat kami sampaikan, dengan harapan terwujudlah suatu kegiatan pembangunan yang berkesinambungan.

Mojoagung, 10 Juli 2024

CAMAT MOJOAGUNG



MUCHTAR, S.IP., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19720621 199803 1 005

RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN MOJOAGUNG
TAHUN 2024



KECAMATAN : MOJOAGUNG
KABUPATEN : JOMBANG

